

Implementation of otoritas jasa keuangan policy towards Pandawa group: juridical analysis = Penerapan kebijakan otoritas jasa keuangan terhadap Pandawa grup: analisis yuridis

Hafizh Amrullah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20459006&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRACT

This thesis analyzes the jurisdiction for the Otoritas Jasa Keuangan policy towards the Pandawa Group with the prevailing regulations for the funds institutions. The research method conducted on this thesis is based on normative juridical research, and it is found that that OJK had regulatory and supervision power over several funds institutions institusi penghimpun dana cooperating with several others financial supervision bodies, such as Bank of Indonesia, BAPEPAM LK, and Bappebti with regards to the macro financial activities. Other than that, OJK also had power to supervise and regulates a micro financial institutions where it activities focuses on funding the savings of the society and or member of the institution itself, and it may be in form of limited liability company or a micro financial which owned by a cooperative. Based on license issued by the Ministry of Cooperative and SMEs, Pandawa Group is in a form of Savings and Loan cooperative, in which they are regulated under the Ministry of Cooperative and SMEs. After analyzing the form and the activity of the Pandawa Group itself, the action taken by the OJK was out of their jurisdiction, yet it was necessary to actively interfere the Pandawa Group activity. Based on these findings, this thesis recommends to make every license of any funding activity in any form of institution should be from one single institution to avoid the scamming based on license which permitted by one of the one of the authorized state institutions.

ABSTRAK

Tesis ini menganalisis yurisdiksi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Grup Pandawa dengan peraturan yang berlaku untuk institusi penghimpunan dana. Metode penelitian yang dilakukan pada tesis ini didasarkan pada penelitian yuridis normatif, dan ditemukan bahwa OJK memiliki kewenangan mengatur dan pengawasan terhadap beberapa lembaga penghimpun dana bekerjasama dengan beberapa lembaga keuangan lainnya, seperti Bank Indonesia, BAPEPAM - LK, dan Bappebti berkenaan dengan kegiatan keuangan makro. Selain itu, OJK juga memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan mikro dimana kegiatannya berfokus pada Simpan-Pinjam terhadap masyarakat dan / atau anggota institusi itu sendiri, yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau lembaga keuangan mikro yang dimiliki oleh koperasi. Berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Pandawa Group berbentuk koperasi simpanpinjam, yang diatur di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Setelah menganalisis bentuk dan aktivitas Kelompok Pandawa itu sendiri, tindakan yang diambil oleh OJK berada di luar yurisdiksinya, namun tindakan tersebut dirasa perlu untuk secara aktif mengintervensi aktivitas Pandawa Grup yang melawanketentuan dari peraturan Koperasi Simpan Pinjam. Berdasarkan temuan tersebut, skripsi ini merekomendasikan agar setiap lisensi dari setiap kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk badan apa pun harus berasal dari satu institusi tunggal agar tidak melakukan penipuan berdasarkan lisensi yang diizinkan oleh salah satu lembaga negara yang berwenang.